

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tenaga Kerja

2.1.1.1 Teori Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Sudarso (1991), tenaga kerja merupakan manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi yang meliputi keadaan fisik jasmani, keahlian-keahlian, kemampuan untuk berfikir yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

Sedangkan menurut Simanjuntak (1990) tenaga kerja (*man power*) mengandung pengertian. Pertama, tenaga kerja mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Faktor produksi merupakan faktor pemegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Faktor produksi sebagai hal yang sangat diperlukan secara teknis untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi tenaga kerja dikategorikan sebagai faktor produksi asli, dalam faktor produksi tenaga kerja terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, dalam hal ini faktor produksi tidak akan berjalan apabila tidak adanya manusia yang mengendalikan sekalipun teknologi yang digunakan sudah sangat modern.

1. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja diartikan sebagai suatu tempat atau pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Penjual tenaga kerja di dalam pasar ini merupakan para pencari kerja. Pembelinya disini merupakan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja disini untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya.

Menurut Suroto (1992) Pasar tenaga kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja dalam masyarakat atau seluruh permintaan dan penawarannya dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif antara orang yang menjual tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2001), pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku ini terdiri dari :

1. Yang membutuhkan Pengusaha tenaga.
2. Pencari Kerja
3. Perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.

2. Permintaan tenaga kerja

Menurut Irman (2020) Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan antara tingkat upah (harga tenaga kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk mempekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha dalam tingkat upah dan jangka waktu tertentu.

Permintaan dalam ekonomi diartikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990).

Dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga. Maka dari itu di satu pihak, perusahaan disebut dengan *price taker*, yaitu perusahaan tersebut tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau menurunkan produksinya. Di satu pihak perusahaan dapat menjual berapa saja produksinya dengan harga yang berlaku. Fungsi permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada :

1. Tambahan hasil marginal yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha dengan penambahan seorang pekerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal atau *marginal physical product* (MPP_L) dari tenaga kerja.
2. Permintaan marginal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal atau *marginal revenue* (MR). Permintaan marginal disini merupakan besarnya tambahan hasil marginal yang dikalikan dengan harga per unit, sehingga

$$MR = VMPP_L = MPP_L \times P.$$

MR : *Marginal revenue*, penerimaan marginal

VMPP_L : *Value marginal physical product of labor*, nilai pertambahan hasil maarginal jurnal dan karyawan

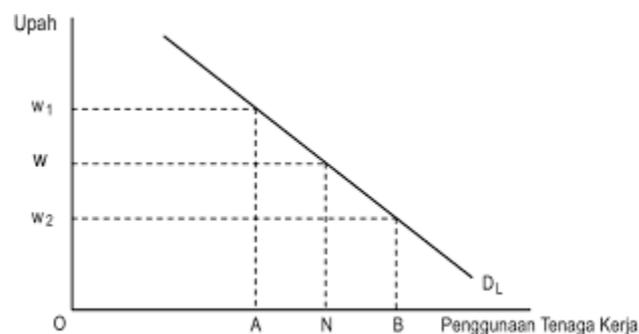
MPP_L : *Marginal physical product of labor*

P : Harga jual barang yang diproduksi per unit.

Perusahaan dalam hal ini dapat membandingkan MR dengan biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan tambahan seorang pekerja atau Marginal Cost (MC). jika nilai MR lebih besar dibandingkan dengan nilai MC maka mempekerjakan tambahan karyawan tersebut dapat menambah keuntungan sehingga perusahaan akan terus menambah pekerja.

Namun dalam hal ini jika tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat atau faktor produksi lain jumlahnya tetap akan diikuti oleh penurunan tambahan hasil marjinal (MPP). Hal tersebut dikarenakan perbandingan alat-alat produksi yang digunakan setiap pekerja menjadi lebih kecil sehingga tambahan hasil marjinal menjadi kecil pula.

Hal ini disebut dengan diminishing return yang digambarkan pada kurva jangka pendek dari permintaan tenaga kerja :



Gambar 2.1 Fungsi Permintaan Tenaga Kerja

Sumber : Simanjuntak (1985)

Dilihat dari gambar 2.1 di atas garis DL merupakan hasil nilai dari majinal VMPP_L untuk setiap tingkat tambahan tenaga kerja yang digunakan. Jika jumlah tenaga kerja digunakan sebanyak OA maka besarnya nilai VMPP_L sama dengan W₁. Nilai ini lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan tingkat upah yang berlaku (W). Dalam hal ini untuk meningkat laba maka perusahaan akan menambah tenaga kerja baru, perusahaan dapat menambah tenaga kerja tentunya untuk memaksimalkan tingkat keuntungan. Sedangkan sebaliknya, jika penggunaan tenaga kerja sebanyak OB maka besarnya VMPP_L sama dengan W₂. Hal ini akan mengurangi keuntungan perusahaan karena perusahaan harus membayar upah pada tingkat upah yang berlaku (W) sedangkan hasil nilai

marginal yang diperoleh sebesar W_2 yang lebih kecil dari pada W , maka dari itu perusahaan tidak akan melakukan penambahan penggunaan tenaga kerja lebih dari garis ON, apabila perusahaan tetap ingin mempergunakan tenaga kerja lebih dari ON maka dari itu perusahaan harus menaikkan harga jual dari produksi atau tenaga kerja yang tersedia untuk nantinya dibayar dengan dibawah upah yang telah ditetapkan (W).

2.1.1.2 Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi tenaga kerja adalah penyusunan bersistem atau pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yaitu :

1. Berdasarkan Penduduk
 - a. Tenaga kerja: tenaga kerja adalah seluruh jumlah tenaga kerja penduduk yang dianggap dapat bekerja, jika tidak ada permintaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia diantara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
 - b. Bukan tenaga kerja : bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu atau tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan tenaga kerja. menurut Undang-Undang Tenaga kerja No 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia yaitu mereka yang berusia 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun.
2. Berdasarkan Batas Kerja

- a. Angkatan kerja : Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
 - b. Bukan angkatan kerja : bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya bersekolah dan mengurus rumah tangga dan sebagainya.
3. Berdasarkan kualitasnya :
- a. Tenaga kerja terdidik : tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal atau non formal.
 - b. Tenaga kerja terlatih : tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan mempunyai pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.
 - c. Tenaga kerja tidak terdidik : tenaga kerja yang tidak terdidik maupun terlatih adalah mereka yang hanya mengandalkan tenaga saja.

2.1.2 Industri

2.1.3.1 Definisi Industri

Sektor industri tentunya memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan

nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan baku yang akan diolah.

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian memiliki dasar pertimbangan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Menurut BPS (2018), industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi berupa mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus dan digerakan oleh mesin dan manusia.

Menurut Abdurachmat dan Maryami (1998:27) industri merupakan salah Satu kegiatan ekonomi manusia yang penting, ia menghasilkan berbagai

kebutuhan hidup manusia mulai dari makanan, minuman, pakaian serta peralatan rumah tangga sampai peralatan perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.

2.1.3.2 Jenis dan Tujuan Industri

1. Jenis industri berdasarkan pengelompokan tenaga kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS,2003) Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi empat kriteria, antara lain :

- a. Industri Besar: industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- b. Industri menengah: industri yang menggunakan tenaga kerja antara 20-99 orang.
- c. Industri kecil: industri yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 orang.
- d. Industri mikro/rumah tangga: industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

2. Jenis industri

Jenis industri berdasarkan nilai asset netto yang diatur dalam undang undang No.9 Tahun 1995, dimana:

- a. Industri Besar: usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung dan tanah) sebesar 10 milyar keatas.
- b. Industri menengah: usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung dan tanah) antara 200 juta sampai 10 milyar.

c. Industri kecil dan Mikro: usaha yang memiliki asset neto (tanpa gedung dan tanah) tidak lebih dari 200 juta.

3. Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi.

Berdasarkan Internasional Standart of Industrial Clasification (ISIC), dengan berdasarkan pendekatan kelompok komoditas industri manufaktur terbagi atas beberapa kelompok komoditas.

4. Jenis – jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan

a. Industri primer

Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu

Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

b. Industri Sekunder

Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.

Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.

c. Industri Tersier

Industri tersier dalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Berdasarkan Tujuan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian, perindustrian diselenggrakan dengan tujuan :

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.
- b. Bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.
- c. Bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian.

2.1.3 Upah

2.1.3.1 Definisi Upah

Sistem pengupahan disuatu negara biasanya didasarkan kepada teori yang dianut oleh negara itu sendiri. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja.

1. Perbedaan tingkat upah

Perbedaan tingkat upah terdiri dari setiap sektor antar daerah.

Perbedaan tingkat upah tersebut terjadi antara lain :

- a. Pada dasarnya pasar kerja terdiri dari beberapa pasar kerja yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Disatu pihak, pekerjaan yang berbeda memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang berbeda. Perbedaan tingkat upah dapat terjadi karena perbedaan tingkat pendidikan, latihan dan pengalaman.
- b. Tingkat upah di tiap perusahaan berbeda menurut persentase biaya pekerja terhadap seluruh biaya produksi. Semakin kecil proporsi biaya pekerja terhadap biaya keseluruhan, semakin tinggi tingkat upah.
- c. Perbedaan tingkat upah antara beberapa perusahaan dapat pula terjadi menurut perbedaan proporsi keuntungan perusahaan terhadap penjualannya.

- d. Perbedaan tingkat upah antar perusahaan dapat berbeda karena perbedaan peranan pengusaha yang bersangkutan dalam menentukan harga.
- e. Tingkat upah dapat berbeda menurut besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar dapat memperoleh kemanfaatan *economic of scale* dan oleh sebab itu dapat menurunkan harga, sehingga mendominasi pasar.
- f. Tingkat upah dapat berbeda menurut tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan.
- g. Perbedaan kemampuan atau kekuatan serikat pekerja dapat mengakibatkan perbedaan tingkat upah.
- h. Tingkat upah dapat pula berbeda karena faktor kelangkaan. Semakin langka tenaga kerja dengan ketrampilan tertentu, semakin tinggi upah yang ditawarkan pengusaha.
- i. Tingkat upah dapat berbeda sehubungan dengan besar kecilnya resiko atau kemungkinan mendapat kecelakaan di lingkungan pekerjaan. Semakin tinggi mendapat resiko, semakin tinggi tingkat upah.

2. Sistem pengupahan dan komponen upah

Penghasilan atau imbalan yang diterima seorang karyawan atau pekerja digolongkan kedalam empat bentuk antara lain :

a. Upah dan gaji

Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja.

b. Tunjangan dalam bentuk natura

Tunjangan ini diberikan berupa beras, gula, garam dan pakaian pada mulanya diberikan kepada karyawan atau pekerja di perkebunan yang tempatnya terpencil atau jauh dari kota.

c. *Fringe benefit*

Berbagai jenis *benefits* diluar gaji yang diperoleh seseorang sehubungan dengan jabatan dan pekerjaan. *Fringe benefit* bisa berbentuk dana yang disisihkan oleh perusahaan atau pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan dan sebagainya.

d. Kondisi lingkungan kerja

Kondisi lingkungan kerja ini dapat mencakup dalam lokasi perusahaan dan jaraknya dari tempat tinggal, kebersihan kualitas supervisi dan sebagainya.

4. Kebutuhan hidup dan Upah Minimum

Upah merupakan sumber utama dalam penghasilan seorang karyawan, buruh atau pekerja. Upah pada dasarnya harus mencukupi dalam memenuhi kebutuhan karyawan, buruh atau pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran ini dapat diukur untuk kebutuhan hidup minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).

2.1.4 Pendidikan

2.1.4.1 Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan Nasional, selain itu pendidikan juga merupakan penentu ekonomi suatu negara.

Tidak mengherankan bahwa negara-negara di dunia dengan cepat menanggapi tentang pentingnya investasi sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Menurut Sadono Sukirno (1985) kecakapan masyarakat untuk mempersiapkan dan melakukan pembangunan antara lain tingkat pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan pembangunan ekonomi dengan mempertinggi tingkat pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan merupakan usaha untuk 20 mengerti dan mewujudkan proses pembelajaran peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki seperti keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan ketrampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan presentase penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7 – 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar.

2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

3. Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya presentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

2.1.4.2 Tujuan Pendidikan

Menurut M.J. Langeveld bahwa manusia perlu pendidikan, apabila tanpa pendidikan manusia tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Tujuan

pendidikan sebagai pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) yang pengembangan potensi ada pada masing-masing individu yang diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup individu itu sebagai perorangan dalam hubungannya dengan hidup masyarakat, pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah mengembangkan tanggung jawab pribadi bagi peningkatan kualitas hidup individu dan sekaligus tanggung jawab pribadi dalam membangun seluruh masyarakat Indonesia.

Selain sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan juga sangat penting bagi etika atau lebih tepat etos kerja yang merupakan daya penggerak dinamika suatu masyarakat. Kebudayaan sekarang cenderung diarahkan kepada kehidupan santai. Mungkin karena alam yang begitu kaya sehingga menimbulkan semangat manusiannya untuk berusaha keras. Pendidikan dapat mengobarkan kembali etos kerja bagi generasi muda yang harus dimulai dari lingkungan keluarga dan menjalar ke masyarakat luas.

Menurut simanjuntak pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat di peroleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Teori Human Capital Teori ini berasumsi bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi, di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Disamping penundaan menerima penghasilan tersebut.

2.1.5 Investasi

3.4.3.1 Definisi Investasi

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan, salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang dimiliki saat ini.

Menurut Sukirno (2002), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Tidak jauh berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw (2003), investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan di masa depan.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Para pelaku investasi adalah pemerintah, swasta, dan kerjasama pemerintah-swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Komponen yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara yaitu investasi, dalam hal ini secara teori maka peningkatan investasi tentunya akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan

memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rosyidi (2000:169) jenis investasi dikelompokkan menjadi 4 kelompok (bertujuan agar tidak terjadi jenis investasi yang masuk dalam dua pengelompokan), antara lain:

1. Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional

Autonomos Investment (Investasi Otonom), merupakan investasi yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional. *Induced investment* (Investasi terimbas) adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

2. Berdasarkan Subjeknya

- a. *Public Investment* (Investasi Pemerintah), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

- b. *Private Investment* (Investasi Swasta), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

3. Berdasarkan alasannya

- a. *Domestic Investment* (Investasi Dalam Negeri), merupakan penanaman modal didalam negeri, artinya penanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam negeri.

- b. *Foreign Investment* (Investasi Asing), yaitu penanaman modal asing yang artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri untuk digunakan didalam negeri guna mengoptimalkan sumberdaya yang masih belum dimanfaatkan.
4. Berdasarkan unsur pembentukannya
- a. *Gross Investment* (Investasi Bruto), merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu.
 - b. *Net Investment* (Investasi Neto), merupakan hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan (Depreciation) atau disebut Investasi Bersih.

3.4.3.2 Sumber Investasi

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 pasal 2 tentang sumber Penanaman Modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

- a. Perseroan Terbatas (PT).
- b. Commanditaire Vennootschap (CV).

- c. Firma (Fa).
- d. Badan Usaha Koperasi.
- e. BUMN.
- f. BUMD.
- g. Perorangan.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Dumairy (1999) Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan (Dumairy, 1999).

Menurut Muana Nanga, (2001) faktor-faktor yang menentukan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat suku bunga, terdapat hubungan negatif antara jumlah investasi dan tingkat bunga. Jika tingkat suku bunga naik level investasi akan berkurang, sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah orang akan berbondong-bondong menanamkan investasi diberbagai bidang usaha.

- b. Inovasi dan teknologi, adanya temuan-temuan baru yang menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menanamkan investasi untuk membeli mesin-mesin dan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih.
- c. Tingkat perekonomian, makin banyak aktifitas perekonomian makin besar pendapatan nasional, dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung. Yang pada akhirnya akan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan.
- d. Ramalan atau harapan orang tentang perekonomian dimasa datang, jika orang meramal perekonomian dimasa yang akan datang cerah, orang akan giat melakukan investasi sekarang.
- e. Tingkat keuntungan perusahaan, makin besar tingkat keuntungan perusahaan makin banyak bagian laba yang dapat ditahan (retained earnings) dan bagian laba yang ditahan ini dapat digunakan untuk tujuan investasi.
- f. Situasi politik, jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan maka tingkat investasi akan tinggi. Dan sebaliknya jika pemerintah tidak banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan banyak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit maka tingkat investasi akan rendah.

2.1.6 Unit Usaha

2.1.6.1 Definisi Unit usaha

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya.

Menurut Murti Sumarni (1997) Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Menurut Raharjo M Dawam (dalam penelitian Risma Handayani, 2016) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba). Apabila melihat isi Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 yang telah disebutkan diatas, definisi perusahaan mengandung dua unsur pokok, yaitu:

1. Bentuk usaha (*company*) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

2. Jenis usaha (business) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

Dengan peranan badan usaha tersebut, sekaligus berpedoman atas peran badan usaha, nantinya roda perekonomian akan bisa berjalan dengan lancar.

2.1.5.1 Bentuk - Bentuk Badan Usaha

Dari pengertian badan usaha yang diungkapkan oleh para ahli, maka bahwa sanya badan usaha merupakan kegiatan memproduksi barang yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan peranan badan usaha tersebut, maka badan usaha sekaligus menjadi pedoman bagi roda perekonomian yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Berikut adalah bentuk dan jenis usaha :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun jenis-jenis badan usaha milik negara :

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan masyarakat, misalnya PT. Kereta Api Indonesia.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Ini adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dimana para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit. Dengan begitu, Persero tidak akan mengalami kerugian.

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha dimana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing. Adapun jenis badan usaha milik swasta antara lain :

a. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang.

b. Perusahaan Perseorangan

Namanya saja perusahaan perseorangan, jadi pemilik bertanggung jawab penuh pada kegiatan usaha, resiko dan juga kegiatan usahanya.

Karena itu, harta pribadi dan harta perusahaan kerap disebut sebagai kekayaan perusahaan.

c. Firma (Fa)

Firma (baca: pengertian firma) merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama, termasuk hutang perusahaan. Penguasaan firma dalam keuntungan yang tinggi meskipun harus membagi dengan sekutunya atau rekannya.

d. (Commanditaire Vennootschap)

Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam CV ada yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang memberikan modal). Badan usaha ini merupakan badan usaha yang haknya sama dengan PT dalam melakukan kegiatan usaha. CV dapat melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah (tender) atau dengan swasta.

e. Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban.

3. Perusahaan Multinasional

Perusahaan ini akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersaing di era globalisasi. Ada beberapa faktor yang

membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah terlengkapinya unsur-unsur perusahaan sesuai dengan jabaran pengertian perusahaan di atas, antara lain:

- a. Kegiatan dalam bidang ekonomi.
- b. Memiliki badan usaha.
- c. Bersifat konsisten.
- d. Terang-terangan.
- e. Memiliki keuntungan atau laba.
- f. Ada pembukuan

4. Jenis-jenis Perusahaan Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar ... data provinsi serta kabupaten atau kota Jenis-jenis perusahaan berdasarkan Lapangan Usaha antara lain :

- a. Perusahaan Ekstraktif ialah perusahaan yang bergerak di bidang Pemanfaatan kekayaan alam. Pemanfaatan kekayaan ini meliputi penggalian, pengambilan hingga pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Contohnya tambang batu bara.
- b. Perusahaan Agraris ialah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Contohnya perusahaan yang bekerja di bidang perkebunan, pertanian dan lainnya.
- c. Perusahaan Industri ialah perusahaan yang melakukan produksi barang mentah menjadi setengah jadi atau bahkan produk siap jual. Contohnya usaha pertokoan.

- d. Perusahaan Jasa ialah perusahaan yang bergerak di sektor jasa atau layanan. Contohnya jasa asuransi, pembiayaan, perhotelan dan lainnya.

2.1.5.2 Tujuan perusahaan

Perusahaan didirikan tentunya memiliki tujuan yang telah ditentukan, tujuannya merupakan titik tolak bagi semua pemikiran dari perusahaan-perusahaan dengan tujuan memberikan jalan bagi kegiatan dengan cara untuk mengukur efektivitas kegiatan perusahaan.

Tujuan perusahaan menurut Warren (2017) adalah memaksimalkan keuntungan (profit). Keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang/jasa.

Sementara menurut murni tujuan perusahaan dibagi menjadi tiga yaitu tujuan pelayanan primer, tujuan pelayanan kolateral, dan tujuan pelayanan sekunder:

- a. Tujuan pelayanan primer, Tujuan pelayanan primer dari suatu perusahaan adalah pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi tujuan primer ini lebih dipengaruhi oleh konsumen/pasar yang dilayani oleh perusahaan yang bersangkutan.
- b. Tujuan pelayanan kolateral, Dalam perusahaan besar, hubungan antara masing-masing pihak menjadi semakin jauh, sedangkan masing-masing pihak mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Maka perlu diketahui perbedaan antara tujuan primer perusahaan dengan tujuan individu atau yang disebut kolateral. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh

individu dalam perusahaan. Sedangkan tujuan kolateral sosial adalah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas/umum diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan.

Tujuan pelayanan sekunder, Tujuan ini merupakan nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nur isana, ahmad Kafwari Mahmud. Dampak Upah, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar. Bulletin of Economic Studies, 2021.	Upah, Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah).	Menggunakan Variabel Pertumbuhan Ekonomi	Upah berpengaruh positif signifikan rata-rata lama sekolah berpengaruh namun tidak signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Takalar.
2	Kholidah Azhar, Zainal Arifin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar	Penyerapan tenaga kerja di sektor Industri Manufaktur.	Menggunakan variabel	Total upah, bahan baku, jumlah perusahaan dan produksi berpengaruh secara signifikan

No	Nama Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	<p>dan menengah pada tingkat Kab/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 1 Juli 2011.</p> <p>Nur Siti Latipah, Kunto Inggit . Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Besar di Provinsi Jawa Timur 2009-2015. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Haal 479-492.</p>	Penyerapan Tenaga Kerja, Unit Usaha, Investasi dan Upah Minimum	Menggunakan Variabe Nilai Produksi dan lokasi penelitian.	<p>terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur.</p> <p>Unit Usaha berpengaruh positif tidak signifikan, nilai produksi berpengaruh positif signifikan, investasi berpengaruh negatif signifikan dan upah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar di provinsi jawa timur 2009-2015.</p>
4	<p>Irma Mar'atus Sholihah, Syaparuddin, Nurhayan. Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 12. No. 1, Januari—Juni</p>	Penyerapan tenaga kerja industri manufaktur, investasi.	variabel laju pertumbuhan ekonomi dan lokasi penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi industri manufaktur dengan angka yang signifikan dibawah nilai probabilita.

No	Nama Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2017			
5	Gde Deny Larasdiputra, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi. Pengaruh tingkat upah, produktivitas, modal dan informasi berbasis teknologi terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di kabupaten bandung. <i>Journal of Economic, Management and Accounting Adpertisi</i> Vol 1, Nomor 1 Juni 2019.	Analisis penyerapan tenaga kerja industri manufaktur.	Menggunakan variabel produktivitas, modal dan informasi berbasis teknologi.	Tingkat upah dan modal berpengaruh negatif sedangkan produktivitas, informasi berbasis teknologi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di kabupaten bandung.
6	Dina Listri Purnamawati, Rifki Khoirudin. Penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di jawa tengah 2011-2015. <i>Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)</i> Volume 4 Nomor 1 2019.	menggunakan variabel upah minimum dan jumlah unit usaha.	n Fixed Effect Model (FEM) dan lokasi penelitian.	upah minimum dan jumlah unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di jawa tengah 2011-2015.
7	Linda Kurnia Dewi , Kunto Inggit Gunawan. Analisis pengaruh investasi PMA, PMDN, nilai produksi dan Unit usaha terhadap	Penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur, Investasi, Unit Usaha.	variabel nilai produksi dan lokasi penelitian.	PMA dan Nilai Produksi berpengaruh negatif sedangkan PMDN dan Unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga

No	Nama Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di provinsi jawa timur. Jurnal Ekonomi & Bisnis Volume 3, Nomor 2 2018.			kerja di jawa timur.
8	Arifatul Chusna. Pengaruh laju pertumbuhan sektor industri, investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di provinsi jawa tengah 1980-2011. Economics Development Analysis Journal 2 (3) (2013)	variabel upah dan investasi	Laju pertumbuhan dan lokasi penelitian.	pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh sedangkan variabel investasi variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
9	Ahmad Mujahidul Furqon, Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik	Penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur, Upah, Investasi, Unit Usaha.	Variabel PDRB, lokasi penelitian.	tingkat upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan PDRB, investasi, dan jumlah produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja Industri Manufaktur di Kabupaten Gresik
10	Riadi. Pengaruh pdrb, umr, dan jumlah perusahaan dalam industri manufaktur terhadap penyerapan	penyerapan tenaga kerja	Menggunakan variabel PDRB, lokasi penelitian	Variabel UMR tidak berpengaruh positif sedangkan Variabel PDRB, Jumlah perusahaan dalam

No	Nama Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	tenaga kerja. Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.			industri manufaktur berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
11	Betty Silvia Ayu Utami, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur (Besar dan Sedang) Provinsi Jawa Timur	Penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum, Investasi.	PDRB, Ekspor dan lokasi penelitian.	variabel ekspor tidak berpengaruh, variabel ekspor tidak berpengaruh, Investasi Industri Manufaktur berpengaruh positif dan signifikan dan PDRB industri manufaktur berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Timur.

2.3 Kerangka Pemikiran

Masalah ketenagakerjaan bukan sekedar hanya terbatasnya lapangan pekerjaan melainkan masalah ini juga menjadi masalah yang serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Perkembangan sektor industri di Kota Tasikmalaya khususnya industri manufaktur tentunya diharapkan dapat

membawa dampak positif sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan tingkat pengangguran. Penelitian ini akan melihat bagaimana penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Kota Tasikmalaya serta mengestimasi variabel upah, tingkat pendidikan, investasi dan jumlah unit usaha.

2.3.1 Hubungan Upah Dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau 54 dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. Selain itu upah juga dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi pengusaha atau produsen, upah merupakan biaya yang harus dikeluarkan sehingga ikut menentukan tinggi rendahnya biaya total. Dari sisi pekerja, upah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil menyumbangkan tenaganya kepada pengusaha atau produsen (Sudarsono, 1996).

Pengaruh dari upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, menurut Simanjuntak (1998), jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya

tingkat kesempatan kerja. Sedangkan menurut Sumarsono dalam Pratomo dan Saputra (2011), menyatakan salah satu dampak dengan adanya kenaikan upah yaitu akan mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan dilanjutkan dengan menurunkan produksi.

2.3.2. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Penyerapan Tenaga Kerja.

Menurut Sadono Sukirno (1985) kecakapan masyarakat untuk mempersiapkan dan melakukan pembangunan antara lain tingkat pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan pembangunan ekonomi dengan mempertinggi tingkat pendidikan.

Selain sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan juga sangat penting bagi etika atau lebih tepat etos kerja yang merupakan daya penggerak dinamika suatu masyarakat. Kebudayaan sekarang cenderung diarahkan kepada kehidupan santai. Mungkin karena alam yang begitu kaya sehingga menimbulkan semangat manusiannya untuk berusaha keras. Pendidikan dapat mengobarkan kembali etos kerja bagi generasi muda yang harus dimulai dari lingkungan keluarga dan menjalar ke masyarakat luas.

Adanya tingkat pendidikan bisa mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di kota Tasikmalaya, dimana meningkatnya tingkat pendidikan maka akan menyebabkan

meningkatnya kuantitas dan kualitas output produksi oleh produsen yang secara langsung akan berdampak terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur (I Buchari, 2016). Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja, semakin tinggi kualitas seseorang (tenaga kerja) maka semakin lebar peluang untuk bekerja.

2.3.2 Hubungan Antara Investasi Dengan Penyerapan Tenaga Kerja.

Menurut Sukirno (2002) Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Dari sektor keuangan, adanya investasi menghasilkan kenaikan output suatu daerah.

Investasi diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk dan kesempatan kerja yang semakin meningkat. Maka dari itu dengan bertambahnya investasi maka akan terciptanya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

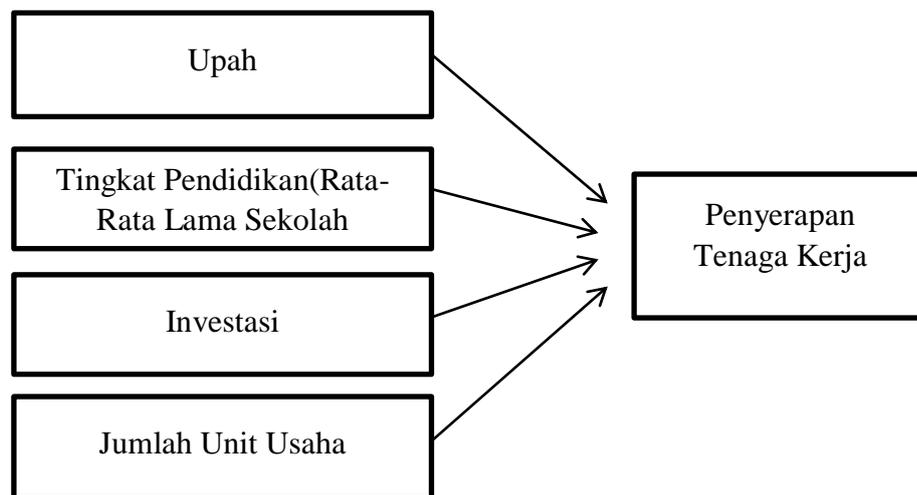
2.3.4. Hubungan Jumlah Unit Usaha Dengan Penyerapan Tenaga Kerja.

Adanya jumlah unit usaha merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan bertambah

nya unit usaha baru maka suatu perusahaan tentunya membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tenaga kerja yang diserap juga akan meningkat.

Dalam hal ini semakin banyak jumlah unit usaha yang ada maka akan meningkatkan kebutuhan pengusaha terhadap tenaga kerja untuk melakukan produksi di mana ketika jumlah unit usaha sektor industri manufaktur bertambah maka keperluan pengusaha akan tenaga kerja yang ingin diperkerjakan untuk produksi juga bertambah.

Dengan kata lain upah, tingkat pendidikan, jumlah unit usaha dan investasi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kota Tasikmalaya.



2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial tingkat pendidikan, investasi dan jumlah unit usaha berpengaruh positif sedangkan upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kota Tasikmalaya.
2. Diduga secara bersama-sama upah, tingkat pendidikan, investasi dan jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Kota Tasikmalaya.